

# REPLIKASI STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS KOMUNITAS UNTUK MENUMBUHKEMBANGKAN PARTISIPASI ELIT-ELIT DAN LEMBAGA LOKAL DALAM PROGRAM ANTI-KEMISKINAN DI NAGARI KOTO KACIAK KABUPATEN PASAMAN

## Abstrak

Kabupaten Pasaman termasuk kelompok daerah dengan angka kemiskinan paling tinggi di Provinsi Sumatera Barat. Dua kecamatan dengan angka kemiskinan paling tinggi di Kabupaten Pasaman adalah Kecamatan II Koto dan Kecamatan Bonjol. Nagari Koto Kaciak adalah nagari dengan angka kemiskinan tinggi di Kecamatan Bonjol. Berbagai program anti-kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah di Nagari Koto Kaciak semenjak lama. Akan tetapi, hasil penelitian yang dilakukan di nagari ini menunjukkan bahwa program-program anti-kemiskinan yang telah dilakukan di Nagari Koto Kaciak pada umumnya gagal. Penyebab utamanya selain dari program-program tidak menyentuh akar persoalan adalah program-program yang telah dilaksanakan tidak berjalan semestinya dan berjalan hanya satu atau dua tahun setelah program selesai. Penyebab utamanya adalah rendahnya monitoring dan pembinaan dari instansi pemerintah sebagai pemangku program terhadap penerima program pasca selesainya kegiatan, dan rendahnya partisipasi tokoh-tokoh dan kelembagaan lokal termasuk pemerintah nagari dalam monitoring dan pembinaan terhadap penerima program pasca selesainya kegiatan. Artikel ini membicarakan hasil penerapan strategi pengentasan kemiskinan berbasis komunitas lokal yang dirumuskan oleh Afrizal dkk (2006) untuk memecahkan masalah gagalnya berbagai program anti kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah di nagari ini.

## A. PENDAHULUAN

Berdasarkan jumlah penerima dana Subsidi Langsung Tunai (SLT), Kabupaten Pasaman termasuk daerah dengan angka kemiskinan paling tinggi (urutan ke dua setelah Kabupaten Mentawai) di Provinsi Sumatera Barat, hampir 40 % rumah tangga di kabupaten tersebut penerima SLT dengan kata lain tergolong miskin (Iib, Afrizal, dkk. 2006, hal. 31-32). Dua kecamatan dengan angka kemiskinan paling tinggi di Kabupaten Pasaman adalah Kecamatan II Koto dan Kecamatan Bonjol (Daftar penerima SLT Kabupaten Pasaman 2006). Nagari Koto Kaciak adalah nagari dengan angka kemiskinan tinggi di Kecamatan Bonjol.<sup>1</sup>

Nagari ini berlokasi strategis. Nagari Koto Kaciak tidak jauh dari ibu kota kecamatan dan kabupaten (terletak 5 Km dari ibu Kota Kecamatan Bonjol dan 10 Km dari ibu kota Kabupaten Pasaman). Disamping itu, nagari terletak di pinggir jalan raya Padang-Medan dan di persimpangan jalan ke Pasaman Barat.

<sup>1</sup> Data penerima SLT Kabupaten Pasaman tahun 2005.

Nagari ini berpenduduk tercatat pada tahun 2006 sebanyak 6.684 orang dengan 1.590 KK (Monografi Nagari Koto Kaciak 2006). Pada umumnya (90%) penduduk tersebut bermata pencaharian di sektor pertanian dengan pertanian padi berlahan basah dilakukan oleh umumnya penduduk. Ada sekitar 40% dari penduduk mempunyai kebun karet, tetapi hanya seluas 1-2 Ha. Penduduk yang tidak mempunyai lahan atau mempunyai lahan sempit bekerja sebagai penyadap karet di kebun karet tersebut.<sup>2</sup> Nagari ini juga produser durian. Hampir 50% rumah tangga mempunyai pohon durian yang memberikannya pendapatan setiap tahun antara Rp 500.000-Rp 1.000.000.<sup>3</sup>

Disamping itu, nagari ini mempunyai pasar tradisional yang ramai setiap hari pasar dan cukup luas ( $\pm$  1 ha) untuk ukuran pasar perdesaan. Di pasar ini petani-petani setempat memasarkan produk non padi mereka seperti coklat, kopi, cabe, sayur-mayur dan buah-buahan. Sebagian penduduk yang lain berkesempatan untuk berjualan makanan satu kali seminggu di pasar ini.

Nagari Koto Kaciak adalah desa pertanian. Umumnya penduduk menekuni mata pencarian sebagai petani. Pertanian padi sawah merupakan hal yang utama diikuti oleh perkebunan karet, tetapi tidak luas (umumnya di bawah 1 ha).

Walaupun dengan potensi ekonomi seperti itu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Nagari Koto Kaciak merupakan sebuah nagari dengan angka kemiskinan tinggi. Ketika dilaksanakan program anti-kemiskinan Inpres Desa Tertinggal (IDT) oleh pemerintah pada tahun 1980an, sebagian besar desa-desa yang termasuk dalam nagari ini digolongkan desa miskin dan oleh sebab itu penerima program IDT. Kemudian lebih kurang 20 tahun kemudian situasi kemiskinan tidak berubah di nagari ini. Berdasarkan data SLT, sebanyak 410 kepala keluarga atau 25, 8% dari total rumah tangga terdaftar sebagai penerima SLT.<sup>4</sup> Sampai saat ini tiga jorong (divisi dari nagari) masih menjadi kantong-kantong kemiskinan di nagari ini.

## B. PERUMUSAN MASALAH

Berbagai program anti-kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah di Nagari Koto Kaciak semenjak lama dengan tujuan untuk membebaskan penduduk miskin di nagari ini dari kemiskinannya. Menurut informasi dari kelompok penduduk miskin maupun dari tokoh-tokoh masyarakat, termasuk pemerintah nagari, berbagai program-program anti kemiskinan

<sup>2</sup> Wawancara dengan Sekretaris Wali Nagari Koto Kaciak, Juni 2006.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Sekretaris Wali Nagari Koto Kaciak dan beberapa orang petani durian, Juni 2006.

<sup>4</sup> Hasil FGD yang telah dilakukan dengan kelompok penduduk miskin dan tokoh-tokoh masyarakat yang diadakan oleh Afrizal dan kawan-kawan untuk sebuah penelitiannya pada bulan September 2006.

pemerintah telah masuk ke nagari ini. Program anti-kemiskinan yang sifatnya pengamanan yang diterima penduduk miskin adalah Raskin, SLT, Kartu Sehat dan beasiswa murid sekolah, sedangkan program anti-kemiskinan yang sifatnya pemberdayaan ekonomi yang telah dilaksanakan di nagari adalah program pengembangan keuangan mikro dan program perbaikan ekonomi rumah tangga miskin dengan bantuan ternak dan modal usaha.<sup>5</sup>

Akan tetapi, hasil penelitian yang dilakukan di nagari ini menunjukkan bahwa program-program anti-kemiskinan yang telah dilakukan di Nagari Koto Kaciak pada umumnya gagal. Penyebab utamanya selain dari program-program tidak menyentuh akar persoalan adalah program-program yang telah dilaksanakan tidak berjalan semestinya dan berjalan hanya satu atau dua tahun setelah program selesai. Penyebab utamanya adalah rendahnya monitoring dan pembinaan dari instansi pemerintah sebagai pemangku program terhadap penerima program pasca selesainya kegiatan, dan rendahnya partisipasi tokoh-tokoh dan kelembagaan lokal termasuk pemerintah nagari dalam monitoring dan pembinaan terhadap penerima program pasca selesainya kegiatan.<sup>6</sup>

Program-program anti-kemiskinan pemerintah pusat, provinsi dan bahkan kabupaten akan terus masuk ke Nagari Koto Kaciak. Sebagai contoh, pada akhir tahun 2006, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman telah menyalurkan program penanggulangan kemiskinan Departemen Sosial RI kepada penduduk miskin Nagari Koto Kaciak. Sebanyak 60 orang penduduk miskin yang terkelompok ke dalam 6 kelompok (masing-masing kelompok beranggotakan 10 orang) mendapatkan bantuan sapi dengan model bergulir dalam kelompok (sebuah kelompok diberikan bantuan 5 ekor sapi dengan harapan anggota yang lain akan mendapatkan sapi setelah sapi yang diterima oleh anggota lain beranak). Kelompok tersebut disebut Kelompok Usaha Bersama (KUBE).<sup>7</sup> Pemerintah Provinsi dan kabupaten pasaman pun akan terus melaksanakan program anti-kemiskinan dan Nagari Koto Kaciak akan menjadi penerima program tersebut. Sebagai contoh, Nagari Koto Kaciak penerima program bantuan bibit coklat pemerintah Kabupaten Pasaman.

<sup>5</sup> Hasil FGD yang telah dilakukan dengan kelompok penduduk miskin dan tokoh-tokoh masyarakat yang diadakan oleh Afrizal dan kawan-kawan untuk sebuah penelitiannya pada bulan September 2006.

<sup>6</sup> Hasil analisis hasil FGD dan wawancara mendalam yang telah dilakukan dengan kelompok penduduk miskin dan tokoh-tokoh masyarakat di nagari Koto Kaciak dan pejabat dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman yang diadakan oleh Afrizal dan kawan-kawan untuk sebuah penelitiannya pada bulan Agustus dan September 2006 dan analisis daftar penerima SLT tahun 2005-2006 Nagari Koto Kaciak.

<sup>7</sup> Hasil analisis hasil FGD dan wawancara mendalam yang telah dilakukan dengan kelompok penduduk miskin dan tokoh-tokoh masyarakat di Nagari Koto Kaciak dan pejabat dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman yang diadakan oleh Afrizal dan kawan-kawan untuk sebuah penelitiannya pada bulan Agustus dan September 2006.

Berdasarkan hasil penelitian di berbagai tempat (Afrizal, dkk. 2006) dan pengalaman di Nagari Koto Kaciak sendiri, program bantuan sapi dengan membentuk KUBE tersebut dan bantuan bibit dan bahkan bantuan yang lain berpeluang besar untuk gagal atau paling kurang tidak berjalan dengan baik.

Melalui kegiatan ini, persoalan tersebut dipecahkan dengan membangun keterlibatan aktif dan proaktif berbagai komponen di Nagari Koto Kaciak untuk memonitor dan memecahkan berbagai masalah yang dialami oleh penerima program-program anti-kemiskinan pasca selesainya program (semacam pendampingan dari pemerintahan nagari dan tokoh-tokoh masyarakat setempat). Yang telah dilakukan adalah menerapkan strategi pengentasan kemiskinan berbasis komunitas lokal yang telah dirumsukan oleh Afrizal, dkk., 2006. Strategi ini dirumuskan oleh Afrizal dkk. berdasarkan hasil penelitiannya yang merupakan kerjasama antara Departemen Sosial Republik Indonesia dengan Universitas Andalas (strategi ini akan dipaparkan pada bagian lain).

### C. TUJUAN KEGIATAN

Ada dua tujuan yang hendak dicapai dengan mengadakan kegiatan ini.

1. Diharapkan setelah dilakukan kegiatan, aparatur pemerintahan nagari, pengurus dan anggota kelembagaan dalam nagari dan tokoh-tokoh masyarakat dalam Nagari Koto Kaciak menyadari bahwa keterlibatan mereka dalam monitoring dan pendampingan dengan mencari pemecahan masalah-masalah program-program anti-kemiskinan yang dilakukan di nagari mereka pasca selesainya program-program dapat meminimalkan kegagalan program anti-kemiskinan.
2. Setelah pelaksanaan program, pemerintahan nagari, pengurus dan anggota kelembagaan dalam nagari dan tokoh-tokoh masyarakat dalam Nagari Koto Kaciak proaktif memonitor dan mencari pemecahan masalah-masalah program-program anti-kemiskinan yang dilakukan di nagari mereka pasca selesainya program-program.

### D. MANFAAT KEGIATAN

1. Berbagai elemen dalam masyarakat Nagari Koto Kaciak akan terlibat proaktif memonitor dan memecahkan masalah-masalah program-program anti-kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah, akibatnya berbagai program anti kemiskinan akan berjalan baik. Berjalan

baiknya berbagai program anti-kemiskinan akan dapat menolong rumah tangga miskin dari keterpurukan ekonomi dan akan mampu menolong mereka terbebas dari kemiskinan.

2. Kegiatan ini akan dapat meningkatkan kinerja pemerintah nagari dan dengan demikian mereka akan berwibawa di depan warganya.

## E. TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Kemiskinan

BKKBN tidak menggunakan konsep kaya miskin untuk melapis penduduk secara ekonomi maupun sosial, melainkan konsep sejahtera. Unitnya bukan individu, melainkan keluarga inti (keluarga yang terdiri dari suami-istri, suami-istri dan anak-anaknya atau keluarga dengan orangtua tunggal). Keluarga sejahtera dengan demikian didefinisikan sebagai "keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang syah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat lingkungannya. Dari definisi tersebut terlihat bahwa menurut BKKBN kesejahteraan tidak hanya diukur dengan ukuran material, melainkan juga oleh ukuran-ukuran sosial dan psikologis. Mereka menyebutkannya sebagai keluarga miskin karena ukuran sosial dan keluarga miskin karena ukuran ekonomi (Warta Kependudukan, No. 3 Tahun 2003). Keluarga berdasarkan kesejahteraannya dibagi lima, yakni:

1. Keluarga Pra Sejahtera, dicirikan oleh ketidakmampuan anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal. Kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan spritual, pakaian, makanan, perumahan dan kesehatan.
2. Keluarga Sejahtera I, dicirikan oleh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan dan perumahan secara minimal, tetapi belum mampu untuk memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis.
3. Keluarga Sejahtera II, dicirikan oleh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial-psikologis, tetapi belum mampu untuk memenuhi kebutuhan pengembangan, seperti menabung dan memperoleh informasi.
4. Keluarga Sejahtera III, dicirikan oleh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sosial dan psikologis serta kebutuhan pengembangan keluarga, tetapi belum memberikan kontribusi terhadap masyarakat.
5. Keluarga Sejahtera III Plus, dicirikan oleh kemampuan untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga.

Apabila konsep BKKBN tersebut dikonversi dengan konsep kemiskinan, maka keluarga kategori pra sejahtera dan sejahtera I tergolong keluarga miskin.

BPS di pihak lain menggunakan hanya kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai patokan kemiskinan. Sebenarnya ukuran kemiskinan BKKBN lebih kompleks dan mampu menggambarkan realitas, tetapi karena ukuran kemiskinan dan dengan demikian data kemiskinan yang dipakai oleh pemerintah adalah ukuran dan data kemiskinan BPS, oleh sebab itu kegiatan ini memakai ukuran dan data kemiskinan BPS. Hal ini berarti, rumah tangga miskin didefinisikan berdasarkan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal yang dinyatakan oleh pendapatan mereka dan ditentukan oleh garis kemiskinan. Dengan kata lain, rumah tangga miskin adalah rumah tangga yang pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal.

### **Kerangka Pemecahan Masalah**

#### *Asumsi Teoritis*

Ada berbagai teori yang tersedia yang menjelaskan faktor-faktor penyebab orang miskin dan factor penyebab orang miskin tetap miskin. Perbedaan landasan teori mempengaruhi tawaran strategi pengentasan kemiskinan yang dianjurkan dan yang diterapkan. Berikut ini akan diulas teori-teori kemiskinan dan akan dijelaskan kerangka pemikiran yang melandasi penelitian ini.

Dalam kepustakaan kemiskinan terdapat berbagai teori yang menjelaskan mengapa orang menjadi miskin. Para ahli mencoba mengelompokkan teori-teori tersebut ke dalam beberapa kelompok, yang disebut perspektif.

Seorang sosiolog tersohor masa kini dari Inggris, Giddens (2002, hal. 316-319) mengelompokkan teori-teori kemiskinan ke dalam dua perspektif: pertama adalah perspektif yang memandang orang miskin bertanggung jawab atas kemiskinannya; kedua adalah perspektif yang memandang kemiskinan adalah hasil dari kekuatan-kekuatan struktural dalam masyarakat. Menurutnya, perspektif yang pertama cenderung menyalahkan orang miskin, sedangkan perspektif yang kedua menyalahkan sistem. Menurutnya, disatu pihak perspektif yang pertama berargumentasi bahwa orang miskin disebabkan oleh karena ketidak mampuan mereka untuk berhasil, karena kelemahan-kelemahan pada tingkat individual, seperti kekurangan motivasi dan kekurangan keterampilan. Di pihak lain, perspektif yang ke dua memandang orang miskin disebabkan oleh kekuatan-kekuatan struktural yang orang miskin tidak berdaya untuk mengatasinya.

Kedua perspektif yang dinyatakan oleh Giddens di atas, oleh ahli lain di kelompokkan menjadi Perspektif Kebudayaan dan Perspektif Struktural. Disamping kedua perspektif ini ada perspektif yang ketiga yang memadukan pandangan kedua perspektif di atas, perspektif tersebut adalah Perspektif Integratif/agen dan prinsip (Sherraden 2006, Ancok 1995, hal.164-167 dan Gans 1970). Ketiga perspektif ini akan didiskusikan.

Pertama adalah Perspektif Kebudayaan. Tokoh yang terkenal dengan perspektif ini adalah Oscar Lewis, Rosenmayr, Carles Murray dan Edward Banfield. Menurut perspektif ini, orang miskin dan terus miskin akibat dari kebudayaan kemiskinan yang dianut oleh orang miskin. Kebudayaan kemiskinan itu mencakup nilai-nilai yang di dalamnya termasuk pandangan hidup dan kebiasaan-kebiasaan yang tidak mendorong orang untuk bekerja keras dan menggunakan uang dengan baik, karena berorientasi kepada masa sekarang (Sherraden 2006, hal. 51; Ancok 1995, hal.164-167, Gans 1970 dan Rosenmayr 1970). Berarti, perspektif ini memandang persoalan-persoalan pada tingkat individual orang miskin berkaitan erat dengan kualitas individual orang miskin, seperti pandangan hidup dan kebiasaan hidup. Kebudayaan itu dipahami statis dan punya daya pengaruh yang otomatis terhadap manusia. Menurut Lewis, kebudayaan kemiskinan tersebut bukan akibat dari kelemahan-kelemahan individual, tetapi akibat dari lingkungan sosial yang berpengaruh terhadap sosialisasi anak (Giddens 2002, hal 316-317). Argumen yang mengatakan bahwa orang miskin disebabkan oleh karena mereka malas atau karena mereka tidak bisa berhemat atau tidak biasa menabung atau keterampilan mereka tidak memadai termasuk kedalam perspektif ini.

Solusi untuk memecahkan kemiskinan dari perspektif ini biasanya ditujukan untuk memperbaiki kualitas individual seperti meningkatkan etos kerja, kebiasaan menabung, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan.

Para ahli mengatakan bahwa Perspektif Kebudayaan tersebut mempunyai beberapa kelemahan. Pertama, perspektif ini terlalu melihat kemiskinan akibat dari kesalahan-kesalahan individual. Merekalah yang dipahami bertanggung jawab atas situasinya. Kemiskinan terlalu dipahami sebagai konsekuensi dari pikiran dan kebiasaan-kebiasaan individu. Para ahli kemudian menemukan bahwa banyak orang miskin adalah orang yang bekerja, tetapi gaji yang mereka terima terlalu rendah, sehingga dengan pendapatan mereka itu mereka termasuk orang miskin (Giddens 2002, hal 317-318). Artinya, perspektif kebudayaan menangkap sebagian realitas kemiskinan, sehingga tidak mampu menjelaskan kemiskinan secara keseluruhan.

Kedua adalah perspektif struktural. Menyadari kelemahan Perspektif Kebudayaan, sebagian ahli menengok kepada faktor-faktor yang berada di luar dari individu. Perspektif ini

disebut dengan Perspektif Struktural. Menurut perspektif ini, kemiskinan disebabkan bukan oleh kebudayaan dan bukan oleh kualitas individual, melainkan oleh persoalan-persoalan struktural (ekonomi, politik dan sosial) yang menghambat akses orang terhadap sumber-sumber pendapatan atau yang menyingkirkan orang dari sumber-sumber pendapatan (Giddens 2002, hal 318; Aneok 1995, hal.164-167; Gans 1970 dan Rosenmayr 1970). Solusi yang biasanya dilakukan atau ditawarkan untuk mengentaskan kemiskinan bukan yang berorientasi untuk merubah pandangan hidup atau untuk meningkatkan kualitas individual orang miskin, melainkan kebijakan yang bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan dan aset yang merata dalam masyarakat (Giddens 2002, hal. 318).

Perspektif Struktural pun dikritisi oleh para ahli, karena juga mengandung kelemahan. Perspektif ini tidak mempertimbangkan sama sekali kebudayaan berpengaruh terhadap perilaku manusia. Oleh sebab itu, sebagian ahli memunculkan perspektif yang ketiga.

Ketiga adalah Perspektif Integratif yang menggabungkan antara penjelasan kebudayaan atau individual dengan struktural. Sherraden (2006, hal. 52) menyebut teori ini sebagai teori prinsip dan agen. Kemiskinan dilihat sebagai gejala yang disebabkan oleh perkawinan antara dimensi kebudayaan/individual dan struktural. Kebudayaan tidak dipahami sebagai realitas yang tidak bisa diubah atau berubah, melainkan sebagai realitas yang merupakan cara orang miskin beradaptasi dengan situasi struktural atau dengan kata lain kebudayaan kemiskinan atau faktor-faktor individual dipahami berkaitan erat atau hasil dari kekuatan-kekuatan struktural. Apabila hambatan strukturalnya hilang, maka strategi adaptasinya dapat berubah atau dapat diubah, walaupun tidak berlaku sama untuk setiap orang miskin. (Sherraden 2006, hal. 52-4Aneok 1995, hal.164-167. Gans 1970 dan Rosenmayr 1970).

Penelitian ini memakai perspektif yang ketiga untuk memahami persoalan rumah tangga miskin dan untuk merumuskan strategi pengentasannya di Provinsi Sumatera Barat. Pertama, orang miskin dipahami sebagai orang yang tidak memiliki aset atau orang yang aset yang dimiliki tidak memadai. Karena tidak memiliki aset atau aset tidak memadai itulah mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan minimalnya. Kepemilikan aset berhubungan dengan faktor kebudayaan (kebiasaan menabung) dan struktural (Sherraden 2006, hal. 59-60).

Kedua, orang miskin dipahami sebagai orang yang pekerjaan mereka tidak mampu memberikan pendapatan yang cukup kepada mereka, bukan hanya karena kemalasan tetapi juga upah rendah. Hasil sebuah penelitian di Sumatera Barat menunjukkan bahwa cukup banyak orang miskin dapat digolongkan bekerja di bawah jam kerjanya normal (bekerja 10-36 jam per minggu). Sebagian yang bekerja di bawah jam kerja normal mungkin karena motivasi kerja



rendah. Akan tetapi, hasil penelitian itu juga menunjukkan bahwa jumlah orang yang bekerja dengan jam kerja normal (> 36 jam per minggu) juga banyak yang miskin (Elfindri dkk., 2005, hal. 33). Hal ini disebabkan oleh banyak orang memiliki pekerjaan tetapi tidak memberikan pendapatan yang cukup baginya, disebabkan oleh, seperti yang diungkapkan oleh *World Bank*, pekerjaan yang mereka tekuni tidak memberikan imbalan yang sesuai, sehingga mereka miskin dan tetap miskin. Orang miskin yang aktif bekerja ini dalam terminologi Bank Dunia disebut orang miskin aktif bekerja (*economically active poor*). Kebanyakan (75%) mereka bekerja mandiri atau menekuni pekerjaan non-upah (Elfindri, dkk., 2005, hal. 34).

Ketiga, orang miskin melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kesulitan ekonomi mereka. Konsep yang dipakai untuk menangkap realitas ini adalah konsep strategi adaptasi. Anggota rumah tangga miskin tidak pasif, mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan minimal mereka. Cara yang biasa mereka pakai antara lain adalah: memperpanjang jam kerja, mendiversifikasi sumber pendapatan dan melibatkan anggota keluarga untuk bekerja (Elfindri dkk., 2005). Akan tetapi, upaya-upaya tersebut dibatasi oleh kebudayaan (pengetahuan dan keterampilan) dan peluang usaha serta faktor ekologis (Afrizal, dkk., 2006, hal. 47-54).

Dengan memakai perspektif integratif, kegiatan ini berpendirian bahwa pemahaman terhadap persoalan kemiskinan tidak hanya memfokuskan terhadap persoalan pada tingkat individual, tetapi juga pada persoalan-persoalan di luar dari individu. Konsekuensinya, strategi pengentasan kemiskinan tidak hanya difokuskan kepada perbaikan pada tingkat individual, melainkan juga pada tingkat di luar individu. Karena unit analisis penelitian ini adalah rumah tangga yang merupakan akumulasi dari para individual, maka alur pikiran penelitian ini menjadi: pemahaman persoalan kemiskinan tidak hanya sebatas dalam rumah tangga (individu-individu dalam rumahtangga), tetapi juga persoalan-persoalan di luar rumahtangga, akibatnya, strategi pengentasan kemiskinan tidak hanya perlu perbaikan pada tingkat dalam rumahtangga, melainkan juga perbaikan hal-hal yang berada di luar rumahtangga.

#### ***Pentingnya Keterlibatan Komunitas Lokal dalam Program Anti-Kemiskinan***

Terjadi perubahan strategi pengentasan kemiskinan akhir-akhir ini. Pada awalnya pengentasan kemiskinan dilakukan dengan cara negara atau agen-agen donor memberikan bantuan seperti modal kepada penduduk miskin untuk membuat mereka dapat merubah kondisi ekonominya. Strategi pengentasan kemiskinan seperti ini didasarkan kepada teori yang memandang orang miskin sebagai terget yang pasif dan dengan bantuan luar persoalan

kemiskinan mereka dapat dipecahkan (Martinussen 1997, hal. 297). Akan tetapi akhir-akhir ini disadari bahwa strategi penting dan dapat berkesinambungan yang dapat diterapkan untuk mengentaskan kemiskinan adalah mengaktifkan komunitas lokal untuk terlibat dalam pengentasan kemiskinan dalam komunitas bersangkutan. Strategi ini disebut pengentasan kemiskinan berbasis komunitas setempat (Ancok 1995, hal.167-8, Santoso, dkk., 2003, Muttaqin 2005 dan Afrizal, 2006 dan Afrizal, dkk. 2006).

Ada dua strategi pengentasan kemiskinan yang berbasis komunitas tempatan yang dapat dilakukan. Pertama, strategi pemberdayaan rumah tangga. Rumah tangga miskin di pedesaan maupun perkotaan dengan potensi yang dikuasainya mengatasi kemiskinan dengan cara mereka sendiri. Strategi utama biasanya adalah dengan memanfaatkan potensi tenaga kerja rumah tangga: pria dan wanita, dewasa maupun anak-anak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya wanita berperan ganda, selain terlibat dalam kegiatan reproduksi yang tidak langsung menghasilkan pendapatan, juga terlibat dalam kegiatan produksi yang langsung menghasilkan pendapatan. Pada rumahtangga lapisan bawah atau miskin seringkali peranan wanita mencari nafkah (produksi) lebih nyata dibanding pada rumah tangga lapisan menengah dan atas yang lebih kaya (Hull 1976, Hart 1986 dan Sitorus dkk.,1992). Keterlibatan akses sumber daya ekonomi, dalam hal ini tanah dan modal, menyebabkan rumah tangga miskin di pedesaan berupaya memanfaatkan potensi tenaga kerja yang rasional. Konsolidasi tenaga kerja dalam strategi alokatif rumah tangga miskin itu sangat ketat (Hart 1986). Dalam strategi ekonomi rumah tangga miskin pedesaan misalnya, wanita seperti juga pria biasanya memiliki peran yang sangat penting sebagai pencari nafkah di bidang pertanian maupun non-pertanian. Hal ini berarti, memberdayakan anggota rumah tangga yang laki-laki sama pentingnya dengan memberdayakan anggota rumah tangga yang perempuan.

Kedua, Afrizal dan Afrizal, dkk. (2006) menganjurkan untuk menerapkan strategi yang mereka sebut sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Komunitas Lokal. Strategi pengentasan kemiskinan seperti ini kata mereka bertumpu kepada kekuatan komunitas desa itu sendiri dalam arti kata menggunakan kekuatan-kekuatan sosial di dalam komunitas pedesaan itu sendiri untuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini, kata mereka, dapat dilakukan karena upaya mengatasi kemiskinan juga dilakukan oleh komunitas desa itu sendiri.

Dalam hal ini menjadi relevan untuk mengaitkan strategi pengentasan kemiskinan dengan konsep energi sosial-budaya kreatif, suatu kekuatan internal pada tingkat lokalitas (komunitas) seperti nagari, jarong, kampung dan kelompok ketetanggaaan ataupun kewargaan. Konsep energi sosial kreatif ini menunjuk pada tiga aspek, yaitu: (a) gagasan (*ideas*) dasar yang

disepakati tentang suatu tujuan positif, (b) harapan atau cita-cita (*ideal*) yang disepakati tentang wujud mencapai tujuan itu, dan (c) kebersamaan (*friendship*) dalam upaya mencapai tujuan itu (Uphoff 1990 dan Sitorus dkk., 1992). Energi sosial itu terdapat pada satuan lokalitas dalam bentuk pranata-pranata yang berorientasi pada kesejahteraan bersama yang telah dijelaskan sebelumnya.

## F. METODE PENERAPAN IPTEKS

### Hasil Ipteks yang akan Diterapkan

Untuk memecahkan masalah kurangproaktifan kelembagaan dan tokoh-tokoh Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Bonjol, untuk mencari pemecahan masalah-masalah program anti-kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintah telah dilakukan dengan menerapkan strategi pengentasan kemiskinan berbasis komunitas lokal yang dirumuskan oleh Afrizal dkk. Strategi tersebut sebagai berikut.

Berdasarkan hasil penelitian mereka, inti dari strategi tersebut adalah sebagai berikut.<sup>8</sup>

1. Organisasi-organisasi komunitas tempatan didorong dan dikondisikan untuk aktif mengentaskan kemiskinan dalam komunitasnya dengan menggunakan sumber-sumber daya setempat dan bantuan dari luar.
2. Organisasi-organisasi dan tokoh-tokoh masyarakat tempatan itu sendiri harus aktif dan proaktif melakukan upaya-upaya pengentasan kemiskinan dalam komunitasnya dengan melaksanakan program yang mereka susun berdasarkan analisis potensi dan aspirasi setempat.
3. Agar berbagai kelembagaan dan tokoh-tokoh nagari proaktif diperlukan upaya pembangunan kesadaran agar lembaga-lembaga dan tokoh masyarakatan tempatan menyadari bahwa pengentasan kemiskinan merupakan tugas mereka dan mereka merasa mampu melakukannya dengan bimbingan berbagai pihak.
4. Organisasi-organisasi dan tokoh-tokoh masyarakat tempatan itu sendiri harus mampu melaksanakan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang disusun sesuai potensi dan aspirasi setempat.
5. Untuk melakukan pengentasan kemiskinan dan memecahkan berbagai masalah program anti-kemiskinan yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah di komunitas lokal

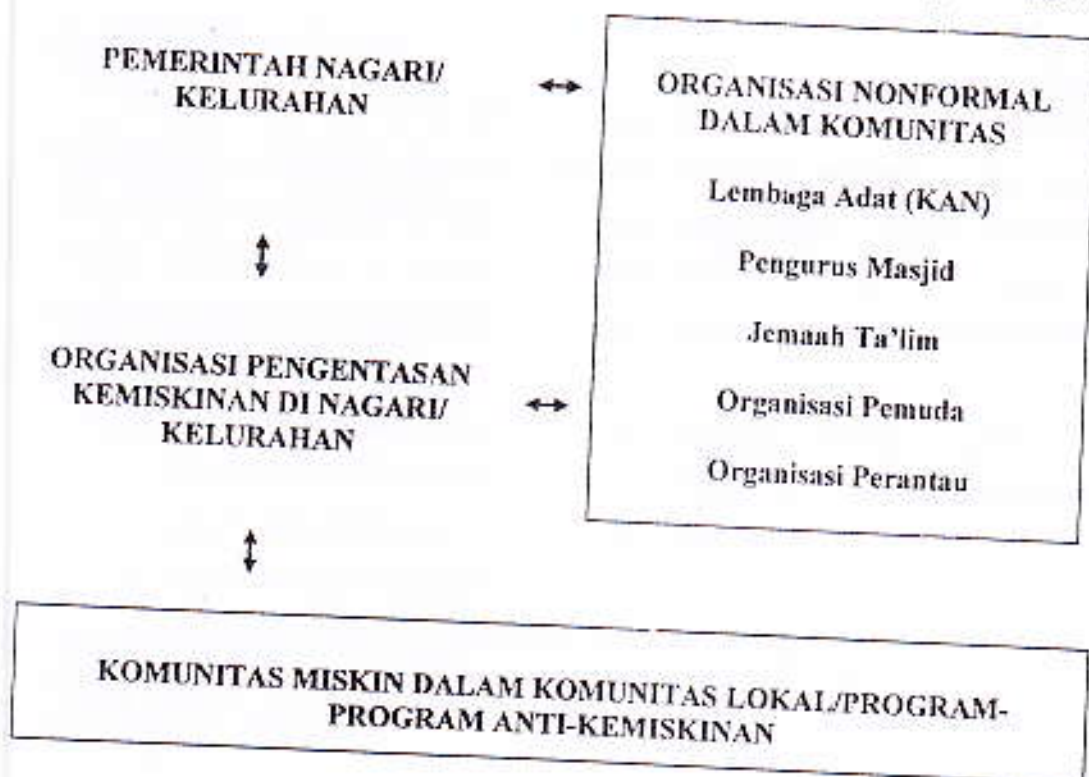
---

<sup>8</sup> Lih. Afrizal, dkk., 2006.

diperlukan sebuah organisasi yang dapat disebut dengan berbagai nama. Organisasi tersebut dapat organisasi yang sudah ada atau organisasi yang dibuat baru.

- ❖ Panitia dibentuk melalui musyawarah nagari/kelurahan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari/Lurah, diketahui oleh Camat.
- ❖ Panitia terdiri dari pengurus dan anggota, terdiri atas laki-laki dan perempuan secara proporsional.
- ❖ Struktur pengurus minimal terdiri atas: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan sekurang-kurangnya 5 orang anggota.
- ❖ Panitia dan anggota adalah tokoh-tokoh yang terseleksi dan mempunyai komitmen tinggi untuk membantu komunitasnya.
- ❖ Panitia terkait dengan lembaga pemerintahan nagari/kelurahan dan organisasi informal yang berpengaruh secara faktual di nagari/kelurahan.
- ❖ Panitia mempunyai anggaran untuk membiayai operasionalnya.
- ❖ Keterkaitan Panitia Penanggulangan Kemiskinan Nagari/Kelurahan dengan lembaga non pemerintah dalam nagari/kelurahan terlihat dalam diagram 6.1 berikut ini.

Diagram 1. Model Hubungan Panitia Penanggulangan Kemiskinan Nagari/Kelurahan



5. Agar berbagai kelembagaan dan tokoh-tokoh nagari proaktif diperlukan upaya pembangunan kesadaran agar lembaga-lembaga dan tokoh masyarakatan tempatan menyadari bahwa pengentasan kemiskinan merupakan tugas mereka dan mereka merasa mampu melakukannya dengan bimbingan berbagai pihak .
6. Kelembagaan non formal komunitas lokal terlibat aktif sebagai pemonitor dan evaluator program anti-kemiskinan.
7. Pemerintah desa/kelurahan mempunyai program anti-kemiskinan berdasarkan analisis potensi dan aspirasi lokal.

### **Metode Pelaksanaan**

Untuk menerapkan strategi pengentasan kemiskinan berbasis komunitas lokal yang telah dirumuskan oleh Afrizal, dkk., di atas telah dilakukan dengan metode penyuluhan, dan pelatihan. Metode penyuluhan diterapkan untuk memperkenalkan strategi dan membangun kesadaran berbagai elemen komunitas lokal. Penyuluhan dilaksanakan dengan mengedepankan interaksi antara penyuluh dan yang disuluh. Pelatihan dilakukan untuk mengembangkan kemampuan aparatur pemerintahan nagari dalam mengidentifikasi masalah dan mencari pemecahan masalah program penanggulangan kemiskinan.

### **Evaluasi**

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kualitas proses pelaksanaan kegiatan dan output kegiatan yaitu, sejauhmana kegiatan yang telah dilakukan merubah pikiran dan aktivitas khalayak sasaran berkenaan dengan monitoring dan pemecahan masalah-masalah program-program anti-kemiskinan di Nagari Koto Kaciak. Berkaitan dengan itu, evaluasi dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan. Tolok ukur untuk menyatakan keberhasilan program adalah sebagai berikut:

- a. Kehadiran aparatur pemerintahan nagari, pengurus Lembaga Kerapatan Adat Nagari, Pengurus Organisasi Pemuda, Pengurus Masjid, tokoh-tokoh perempuan dan tokoh-tokoh masyarakat yang diundang dalam setiap kegiatan.
- b. Kepuasan peserta penyuluhan.
- c. Terbentuknya Panitia Pengentasan Kemiskinan Nagari.

- d. Pandangan peserta kegiatan tentang perlunya berbagai elemen dalam masyarakat Koto Kaciak berperanserta dalam monitoring dan pemecahan masalah program-program anti-kemiskinan pemerintah pasca pelaksanaan program. Metode yang akan dipakai adalah pre-test dan post-test.
- e. Adanya aktivitas Panitia Pengentasan Kemiskinan Nagari memonitor dan memecahkan masalah-masalah program-program anti-kemiskinan pemerintah.

#### **Khalayak Sasaran**

Khalayak sasaran kegiatan ini adalah pengurus dan anggota kelembagaan formal maupun non formal dan tokoh-tokoh masyarakat Nagari Koto Kaciak. Mereka adalah staf kantor wali nagari, kepala-kepala jorong, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh perempuan, pimpinan adat dan cendikia nagari. Selain dari aparat pemerintah nagari, tokoh-tokoh yang telah diundang untuk menghadiri kegiatan adalah mereka yang peduli dengan penanggulangan kemiskinan di nagari.

#### **G. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Cara Pelaksanaan Kegiatan**

##### *Persiapan Pelaksanaan Pengabdian*

*Pertama kali dilakukan persiapan pengabdian. Pada tahap ini, kegiatan yang telah dilakukan adalah memberitahukan Wali Nagari dan Sekretaris Nagari Koto Kaciak Kec. Bonjol mengenai rencana kegiatan dengan cara mengunjungi nagari ini. Pada saat itu, pengabdian juga menjelaskan rencana kegiatan dan sekaligus meminta izin kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan di wilayah mereka. Izin diberikan secara lisan. Disamping itu, persiapan juga meliputi meminta kesediaan Wali Nagari dan Sekretaris Nagari untuk menjadi penyelenggara kegiatan pengabdian. Pada tahap persiapan ini juga dibicarakan waktu pelaksanaan kegiatan.*

##### *Hasil Pre-test*

Pre-test untuk mengetahui situasi awal partisipasi tokoh-tokoh masyarakat dalam monitoring, evaluasi dan pemecahan masalah program anti kemiskinan yang telah dilaksanakan di Nagari Koto Kaciak telah dilakukan dengan teknik wawancara mendalam. Wawancara mendalam telah dilakukan dengan Wali Nagari, Sekretaris Wali Nagari dan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) penerima program bantuan Sapi Depsos RI. Pada saat itu, hanya program pengentasan kemiskinan DEPSOS RI ini yang sedang berjalan di Nagari Koto Kaciak.

Dari hasil pre-test diketahui bahwa keterlibatan pemerintah nagari dan kepala-kepala jorong dalam monitoring dan pendampingan kepada anggota kelompok KUBE penerima bantuan sapi dari DEPSOS RI rendah. Anggota KUBE telah enam bulan menerima bantuan sapi dan dari sudut pandang instansi pemerinah pelaksana, program telah selesai dilaksanakan, tetapi hampir tidak ada kegiatan monitoring dan pendampingan dari staf wali nagari dan kepala-kepala jorong. Pada hal, program ini pada usianya yang pendek tersebut telah mengalami masalah penting. Empat orang penerima sapi telah berusaha untuk menginsiminasai buatan sapi betinanya yang diterimanya sampai tiga kali (masing-masing membayar Rp 50.000.000 untuk satu kali insininasai kepada petugas), tetapi sapi tersebut belum juga bunting. Tidak ada usaha dari pemerintah nagari dan kepala jorong untuk mengatasi hal ini. Tokoh-tokoh masyarakat lain, seperti tokoh pemuda, perempuan dan pimpinan adat juga tidak melakukan pendampingan. Tambahan lagi, sebanyak 14 ekor sapi dari 24 ekor sapi bantuan dari DEPSOS RI yang diterima oleh anggota KUBE telah tidak ditemukan lagi enam bulan semenjak bantuan tersebut diterima. Umumnya sapi tersebut telah dijual oleh penerima. Akan tetapi, staf wali nagari tidak mencegah hal itu terjadi karena mereka sendiri mengetahui hal tersebut setelah sapi terjual. Juga tidak ada tindaklanjut dari penjualan tersebut. Pada hal, bantuan sapi ini dirancang untuk bergulir dalam kelompok dan dalam nagari. Hal ini berarti anggota kelompok yang lain dan bahkan anggota rumah tangga miskin lain dalam Nagari Koto Kaciak menderita kerugian dari ke gagalan kegiatan ini karena apabila sapi-sapi tidak dijual dan sehat, maka mereka satu saat akan dapat giliran untuk memelihara sapi tersebut dan dapat pula memperoleh anak sapi untuk menjadi aset mereka.

Menurut staf wali nagari, monitoring dan pendampingan terhadap penerima program penanggulangan kemiskinan pemerintah berupa bantuan sapi di atas bukan tugas mereka. Tugas mereka hanya memfasilitasi aparat pemerintah untuk menjalankan program mereka dengan mengirimkan nama-nama calon penerima dan membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Kata mereka, tidak ada penjelasan dari pemerintah bahwa mereka bertugas untuk memberikan pendampingan kepada penerima bantuan.

Terkesan dari hasil pre-test, setelah program bantuan sapi DEPSOS selesai, tidak ada lagi pihak-pihak yang membantu penerima sapi untuk memecahkan berbagai masalah yang mereka hadapi. Tidak ada juga teguran atau sanksi apabila penerima tidak melaksanakan bantuan seperti yang dirancang. Hal inilah yang membuat program ini tidak berjalan baik dan tidak berdampak positif bagi penanggulangan kemiskinan di Nagari Koto Kaciak .

### ***Pelaksanaan Pelatihan dan Penyuluhan***

Pada tanggal 19 Agustus 2008, kegiatan pelatihan dan penyuluhan telah dilaksanakan, bertempat di kantor Wali Nagari Koto Kaciak. Acara telah dimulai pada jam 9.30 dengan kata sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Wali Nagari Koto Kaciak. Peserta penyuluhan terdiri dari staf wali nagari, kepala-kepala jorong dan tokoh-tokoh masyarakat yang peduli dengan penanggulangan kemiskinan. Ada 17 orang peserta acara penyuluhan. Lima orang diantaranya adalah tokoh-tokoh perempuan Nagari Koto Kaciak (daftar hadir peserta terlampir).

Acara pertama adalah pelatihan. Acara ini dimulai pukul 9.30 sampai jam 11.00. Peserta pelatihan adalah staf wali nagari dan kepala-kepala jorong. Teknik pelatihan yang telah dilakukan adalah ceramah dan diskusi. Ceramah dibantu dengan alat peraga, seperti LCD dan laptop dan layar peragaan.

Kemudian dilakukan acara penyuluhan. Acara ini dimulai pukul 11.10 sampai jam 13.30. Peserta penyuluhan adalah tokoh-tokoh masyarakat di luar staf wali nagari dan kepala-kepala jorong ditambah dengan staf wali nagari dan kepala-kepala jorong. Penyuluhan dibantu dengan alat peraga, seperti LCD dan laptop dan layar peragaan.

### ***Materi Pelatihan dan Penyuluhan***

Materi pelatihan untuk staf wali nagari dan kepala-kepala jorong fokus pada peningkatan pengetahuan dan kemampuan mereka dalam hal pemberdayaan dan membangun partisipasi anggota dan pengurus dalam kelompok penerima program anti kemiskinan. Juga termasuk materi tentang penyebab-penyebab tidak berfungsinya kelompok yang dibentuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan (materi pelatihan terlampir).

Sasaran pelatihan bagi mereka dengan materi tersebut adalah agar mereka lebih mampu dimasa yang akan datang untuk melakukan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi anggota dalam kelompok penerima program anti kemiskinan.

Kedua adalah materi penyuluhan untuk mendorong keterlibatan staf wali nagari, kepala-kepala jorong dan tokoh-tokoh masyarakat untuk terlibat aktif melakukan kegiatan monitoring dan pendampingan terhadap program penanggulangan kemiskinan yang telah selesai dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Materi penyuluhan pada dasarnya adalah penjelasan tentang strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Komunitas (materi penyuluhan terlampir).

### ***Hal yang Dapat Dipelajari dari Kegiatan***

Seperti yang telah disinggung terdahulu, keberhasilan kegiatan ini diukur dengan beberapa indikator. Pertama adalah tingkat kehadiran aparatur pemerintahan nagari, pengurus



Lembaga Kerapatan Adat Nagari, Pengurus Organisasi Pemuda, Pengurus Masjid, tokoh-tokoh perempuan dan tokoh-tokoh masyarakat yang diundang dalam setiap kegiatan. Kedua adalah kepuasan peserta pelatihan dan penyuluhan terhadap materi dan cara kegiatan dilakukan. Ketiga, terbentuknya Panitia Pengentasan Kemiskinan Nagari, Keempat adalah pandangan peserta kegiatan tentang perlunya berbagai elemen dalam masyarakat Koto Kaciak berperanserta dalam monitoring dan pemecahan masalah program-program anti-kemiskinan pemerintah pasca pelaksanaan program. Metode yang akan dipakai adalah pre-test dan post-test. Kelima, adanya aktivitas Panitia Pengentasan Kemiskinan Nagari memonitor dan memecahkan masalah-masalah program-program anti-kemiskinan pemerintah.

Dari sudut peserta yang diundang, kegiatan ini berhasil karena sebanyak 80% undang menghadiri acara ini. Berbagai tokoh masyarakat setempat telah hadir dalam acara ini. Tambahan lagi, seluruh staf wali nagari termasuk wali nagari dan sekretaris wali nagari aktif mengikuti acara dari awal sampai akhir. Peserta puas dengan materi dan cara pelatihan dan penyuluhan dilakukan. Dalam sesi tanya jawab penanya mengungkapkan pentingnya materi bagi mereka.

Para peserta menyadari bahwa memang diperlukan monitoring dan pendampingan dari aparat pemerintah nagari dan tokoh-tokoh masyarakat setempat setelah program pengentasan kemiskinan selesai dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar program tersebut berkesinambungan. Hal ini terungkap dalam sesi tanya-jawab. Hampir seluruh peserta yang bertanya dan memberikan komentar menyatakan bahwa bahwa partisipasi mereka untuk memonitor dan memberikan pendampingan terhadap program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah diperlukan.

Hal ini berarti gagasan dari strategi pengentasan kemiskinan berbasis institusi lokal yang diterapkan telah diterima oleh peserta penyuluhan. Akan tetapi, ada beberapa masalah yang disampaikan oleh peserta penyuluhan. Pertama, pemerintah nagari, kepala-kepala jorong dan tokoh-tokoh masyarakat lain tidak mempunyai dasar untuk melakukan monitoring dan pendampingan terhadap program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Mereka khawatir mereka akan dipersalahkan oleh penerima bantuan apabila mereka melakukan kegiatan tersebut karena hal seperti itu tidak dirancang semenjak awal dan penerima bantuan tidak menerima penjelasan atas hal tersebut. Untuk itu, peserta penyuluhan, termasuk wali nagari dan sekretaris wali nagari, menyepakati untuk membuat Peraturan Nagari tentang hal tersebut sebagai landan hukum untuk melakukan monitoring dan pendampingan terhadap program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Disamping itu, staf wali nagari menyadari bahwa harus ada kelembagaan pada tingkat nagari yang mengorganisasi kegiatan monitoring dan pendampingan. Mereka mengusulkan tidak perlu dibuat kelembagaan baru karena kesulitan dana operasional, tetapi tugas tersebut menjadi bagian tugas Seksi Kesejahteraan kantor Wali Nagari. Wali nagari dan sekretaris wali nagari menyetujui bahwa Seksi Kesejahteraan Sosial kantor Wali Nagari dikembangkan menjadi badan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas mengorganisasi kegiatan monitoring dan pendampingan terhadap penerima program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan.

Akan tetapi, mereka mengatakan bahwa staf yang ada tidak mampu melakukan tugas tersebut karena mereka kurang pengalaman. Mereka mengusulkan untuk diadakan pelatihan bagi staf Kesos agar mereka mampu melaksanakan tugas tersebut.

Pada awal Oktober 2008 dilakukan post-test dengan wawancara melalui telepon dengan Sekretaris Nagari Koto Kaciak. Sekretaris Wali Nagari mengatakan staf wali nagari sudah mulai melakukan pendampingan terhadap KUBE penerima sapi, tetapi Peraturan Nagari Belum dibuat.

#### H. KESIMPULAN

Secara umum, walaupun kegiatan ini telah berhasil berdasarkan ukuran-ukuran yang telah dibuat, kegiatan yang dilakukan dalam waktu satu tahun ini dengan dana Rp 7000.000 ternyata tidak mendatangkan hasil optimal dalam menerapkan strategi pengentasan kemiskinan berbasis institusi lokal. Hal ini disebabkan dengan kegiatan ini hal yang dapat dilakukan adalah menyebar luasan gagasan dan penerimaan gagasan oleh sasaran pengabdian, tetapi perubahan perilaku seperti aktif dan proaktif memonitor dan memberikan pendampingan serta pembuatan Peraturan Nagari sebagai dasar hukum keterlibatan aparatur nagari dan tokoh-tokoh masyarakat dalam kegiatan monitoring dan pendampingan tidak dapat diwujudkan.

Agar replikasi pengentasan kemiskinan berbasis komunitas lokal seperti yang dirumuskan oleh Afrizal dkk., dapat diimplementasikan di sebuah nagari, sebaiknya program pengabdian dilakukan multi-tahun dan dengan dana yang memadai, sehingga pengabdian dapat mendampingi dalam jangka waktu yang cukup lama sasaran pengabdian dalam menerapkan strategi.

## I. DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, 2006, "Pengentasan Kemiskinan Berbasis Komunitas Lokal, Makalah dipresentasikan dalam Seminar Klaster Penelitian Universitas Gadjah Mada", 21 Desember 2006, Yogyakarta.
- Afrizal, dkk., 2006, "Pemetaan Kemiskinan Dan Strategi Pengentasannya Yang Berbasis Institusi Lokal Dan Berkelanjutan Dalam Era Otonomi Daerah Di Provinsi Sumatra Barat", Kerjasama antara DEPSOS RI dengan Universitas Andalas. Laporan penelitian yang tidak diterbitkan.
- Ancok, Dj., 1995, 'Pemanfaatan Organisasi Lokal untuk Mengentaskan Kemiskinan', dalam Awan Setya Dewanta dkk., ed, *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Chambers, R., 1987, *Pembang man Desa Mulai dari Belakang*, LP3ES, Jakarta.
- Gans, J., H., 1970, "Poverty and Culture: Some Basic Questions about Methods of Studying Life-Style of the Poor, dalam Peter Townsend, ed, *The Concept of Poverty: Working Papers on Methods of Investigation and Life-Styles of the Poor in Different Countries*, Heinemann, London.
- Gertz, C., 1976, *Involusi Pertanian proses perubahan ekologi di Indonesia*, Bhratara KA, Jakarta.
- Giddens, A., 2002, *Sociology*, Polity Press, Cambridge.
- Hart, G., 1986, *Power, Labor and Livelihood process of change in rural Java*, University of California : Press, London.
- Hikmat, H., 2003, Pemberdayaan Pranata Sosial Pengalaman Empiris, dalam Umi Ratih Santoso, dkk., ed, *Menemukan Model Pemberdayaan Pranata Sosial Dalam Penguatan Ketahanan Sosial Masyarakat: Perspektif Teoritik, Metodologis dan Empiris*, Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat Badan Pelatihan dan Pengembangan Departmene Sosial RI, Jakarta.
- Ismawan, B., 2003, Merajut Kebersamaan untuk Menanggulangi Kemiskinan, *Jurnal Ekora* No. 6, September 2003.
- Rosenmayr, L., 1970, "Cultural Poverty of Working Class Youth, dalam Peter Townsend, ed, *The Concept of Poverty: Working Papers on Methods of Investigation and Life-Styles of the Poor in Different Countries*, Heinemann, London.
- Sitorus, M.T.F. et. al., 1992, *Wanita dan Kemiskinan: Studi tentang Status Wanita dalam Rumah tangga Miskin*. Laporan Hasil Penelitian. BOGOR: BPPS Depsos RI- PSP LP IPB - PSW UNAND.
- Soejadi, R., 2001, *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan*, Yogyakarta, Philosophy Press.
- Uphoff, N., 1988, "Menyesuaikan Proyek pada Manusia" dalam *Mengutamakan Manusia di dalam Pembangunan*, ed, Michael M. Cernea. Publikasi Bank Dunia. LII Press, Jakarta.
- White, B., 1976, *Production and Reproduction in a Javanese Village*, Ph.D. Dissertation.